



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1159/XI/2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN PETA JABATAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : Kpts.625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan jabatan perangkat daerah yang tepat sasaran dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, maka Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KEDUA** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempedomani aplikasi Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau.
- KETIGA** : Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT** : Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga merupakan pedoman Perangkat Daerah untuk penataan bidang kepegawaian dan penerapan sistem Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 625/VII/2025 tentang Analisis Jabatan dan Peta Jabatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Desember 2025



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

T. DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
ANALIS KEBUDAYAAN AHLI Madya	12	0	1	-1
PERENCANA AHLI Madya	12	0	1	-1
PAMONG BUDAYA AHLI Madya	11	2	11	-9
ARSIPARIS AHLI Madya	11	0	1	-1
JUNJAH		2	14	-12

SEKRETARIS
KELAS (12)

KEPALA SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELAS (9)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
BAHASA DAN SENI
KELAS (11)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
BIDANG PELESTARIAN ADAT
DAN NILAI BUDAYA
KELAS (11)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
SEJARAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
KELAS (11)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KEPALA BIDANG
DIPLOMASI DAN PROMOSI BUDAYA
KELAS (11)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

UNIT PELAYANAN TEKNIS
(UPT)

COPY SESUNJUTNYA
BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jatirojo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id

T.1.1. PETA JABATAN SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
KELAS (15)
SEKRETARIS
KELAS (12)

KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
KELAS (9)

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	0	2	-2
ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	1	1	0
ARSIPARIS PENYELIA	8	0	1	-1
ARSIPARIS MAHIR	7	0	1	-1
ARSIPARIS TERAMPIL	6	1	1	0
JUMLAH		2	6	-4

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIS KEHLIAKAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	6	6	0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	1	2	-1
JUMLAH		9	12	-3

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
ANALIS KEUANGAN PUSAT DAERAH AHLI MUDA	10	1	1	0
ARSIPARIS AHLI MUDA	9	0	1	-1
PUSTAKAWAN AHLI MUDA	10	0	2	-2
PERENCANA AHLI MUDA	10	1	1	0
PERENCANA AHLI PERTAMA	8	2	2	0
JUMLAH		4	7	-3

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENELAIAH TEKNIS KEHLIAKAN	7	7	8	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	3	-3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	3	0
JUMLAH		10	14	-4

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jodirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : enjab.riau.go.id

T.2. PETA JABATAN BIDANG DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

KEPALA
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

KELAS (12)

KEPALA BIDANG BAHASA DAN SENI			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	2	3 -1
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	1	3 -2
PAMONG BUDAYA TERAMPIL	6	0	2 -2
JUMLAH	3	3	-5
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAIAH TENNIS KEBELAJARAN	7	5	5 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	2	3 -1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	2 -1
JUMLAH	8	10	-2

KEPALA BIDANG BIDANG PELESTARIAN ADAT DAN NILAI BUDAYA			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	2	4 -2
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	2	3 -1
JUMLAH	4	7	-3
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAIAH TENNIS KEBELAJARAN	7	5	6 -1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	5 -5
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	2 0
JUMLAH	7	13	-5

KEPALA BIDANG SEJARAH, PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	8	1	4 -3
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	2	3 -1
JUMLAH	6	0	2 -2
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
KONSERVATOR	7	1	1 0
KURATOR	7	0	1 -1
PENELAIAH TENNIS KEBELAJARAN	7	2	2 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	3 -3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	2 0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	1	2 -1
JUMLAH	6	11	-5

KEPALA BIDANG DIPLOMASI DAN PROMOSI BUDAYA			
KELAS (11)			
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K +/-
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	1	3 -2
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	1	3 -2
JUMLAH	2	2	-4
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K +/-
PENELAIAH TENNIS KEBELAJARAN	7	5	5 0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	4 -3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	2 0
JUMLAH	8	11	-3

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jeddigo, Pekanbaru, Riau, 28158
Telepon (0761) 47267, Faksimili (0761) 33725, Laman: anjab.riau.go.id

T.3. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) MUSEUM SANG NILA UTAMA DAN TAMAN BUDAYA			
KELAS (11)			

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PAMONG BUDAYA AHLI MUDA	9	0	2	-2
JUMLAH		0	2	-2

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MUSEUM SANG NILA UTAMA				
KELAS (9)				
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	8	1	2	-1
PAMONG BUDAYA TERAMPIL	6	0	3	-3
JUMLAH		1	5	-4

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
KURATOR	7	4	4	0
PENELAHAH TEKNIS KEBUDAYAAN	7	0	1	-1
EDUKATOR	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	6	6	0
JUMLAH		12	14	-2

KEPALA SEKSI PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN TAMAN BUDAYA				
KELAS (9)				
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	+/-
PAMONG BUDAYA TERAMPIL	6	2	2	0
JUMLAH		2	2	0

JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
KURATOR	7	4	6	-2
PENELAHAH TEKNIS KEBUDAYAAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	3	3	0
PENGOLAH LAYANAN OPERASIONAL	5	2	2	0
JUMLAH		11	14	-3

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA				
KELAS (8)				
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	+/-
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	1	1	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	7	7	0
JUMLAH		8	8	0

COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau,
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Jadirejo, Pekanbaru, Riau, 28156
Telepon (0761) 47367, Faksimile (0761) 33725, Laman : anjab.riau.go.id

AK.2. PETA JABATAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK

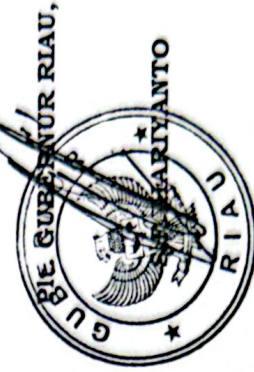
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) RIAU SCIENCE TECHNO PARK
KELAS (11)

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
KELAS (8)

KEPALA SEKSI RISET INOVASI TEKNOLOGI KELAS (8)				
JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	-/-
PENELITI AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	-/-
PENELAIAH TEKNIS KEBUJUKAN	7	1	3	-2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-2
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	2	3	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	3	-1
JUMLAH		5	11	-6

KEPALA SEKSI INKUBASI TEKNOLOGI DAN BISNIS KELAS (8)				
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	-/-
PENELAIAH TEKNIS KEBUJUKAN	7	1	3	2
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	1	-1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	2	3	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	3	0
JUMLAH		6	10	4

JABATAN FUNGSIONAL	KELAS	B	K	-/-
PENELITI AHLI PERTAMA	8	0	1	-1
JUMLAH		0	1	-1
JABATAN PELAKSANA	KELAS	B	K	-/-
PENELAIAH TEKNIS KEBUJUKAN	7	2	2	0
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	5	0	4	4
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	5	2	2	0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	2	2	-3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	4	-1
JUMLAH		5	10	-6



COPY SESUAI ASLINYA
BIRO ORGANISASI